



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

2020 - 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Tahun 2020-2024 dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Renstra Ditjen DIKTI disusun berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan tinggi serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Ditjen DIKTI menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Renstra Ditjen DIKTI Tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Ditjen DIKTI selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta RPJMN Tahun 2020 - 2024.

Renstra Ditjen DIKTI Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Ditjen DIKTI sebagai penggerak sektor pembangunan pendidikan tinggi dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Ditjen DIKTI Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang pendidikan tinggi tahun 2024.

Jakarta, September 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Nizam

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar ..	iv
BAB I Pendahuluan.....	5
1.1 Kondisi Umum Pendidikan Tinggi	7
1.2 Permasalahan dan Potensi Pembangunan Pendidikan Tinggi.....	8
1.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan Tinggi	11
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan.....	13
2.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	13
2.2 Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	15
2.3 Tata Nilai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.....	15
2.4 Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.....	18
2.5 Sasaran Program Pendidikan Tinggi.....	18
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	20
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	20
3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud.....	20
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Tinggi	22
3.3 Kerangka Regulasi	25
3.4 Kerangka Kelembagaan	27
3.4.1 Struktur Organisasi	27
3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	28
3.4.3 Reformasi Birokrasi.....	29
BAB IV Target Kinerja dan KERANGKA Pendanaan	31
4.1 Target Kinerja.....	31
4.2 Kerangka Pendanaan	34
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN	
Lampiran 1a	:Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020
Lampiran 1b	:Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2021-2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Tantangan Pemajuan Pendidikan.....	12
Tabel 2.1 Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2020-2024.....	18
Tabel 2.2 Sasaran Program Pendidikan Tinggi pada tahun 2020-2024	19
Tabel 3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	21
Tabel 3.2 Kerangka Regulasi	26
Tabel 3.3 Jumlah ASN Kemendikbud Tahun 2020	28
Tabel 3.4 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikbud Tahun 2020-2024	29
Tabel 4.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024.....	31
Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020	33
Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2021-2024	33
Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020-2024	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.6 Capaian APK Pendidikan Tinggi terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019	7
Gambar 1.9 Akreditasi Prodi Pendidikan Tinggi.....	8
Gambar 1.14 Perbandingan APK PAUD dan PT dengan negara-negara lain	9
Gambar 1.17 Perbandingan Angka Lulusan Bekerja.....	10
Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila	13
Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar	22
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	27

BAB I

PENDAHULUAN

“...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”
(Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan

hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. **Pertama**, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (*autonomous vehicle*), dan *delivery drone*.

Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (*freelance* dan *temporary*) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) kebinekaan global, (2) gotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) berketuhanan dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicitakan oleh para Pendiri Bangsa.

BAB I Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini terstruktur sebagai berikut:

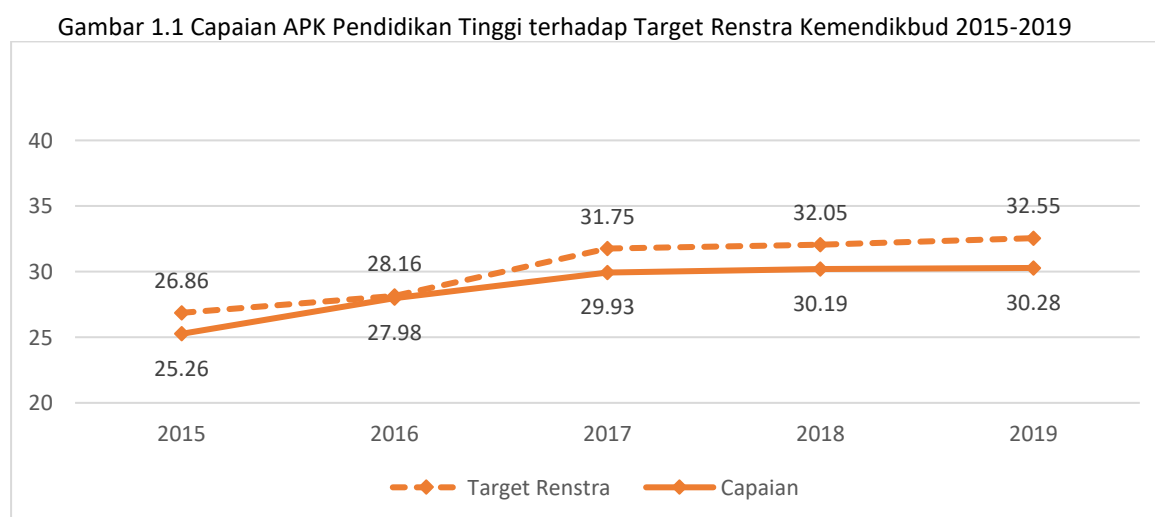
- (a) kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019;
- (b) permasalahan yang masih dihadapi; dan
- (c) tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum Pendidikan Tinggi

Dalam periode Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Tahun 2015-2019, Kemenristekdikti telah meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan tinggi bagi semua warga negara, pemerataan mutu pendidikan tinggi, meningkatkan relevansi mutu pembelajaran dalam pendidikan tinggi, dan menghasilkan lulusan yang kompetitif bersaing dan bekerja dalam waktu kurang dari satu tahun, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

A. Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi

APK pendidikan tinggi menunjukkan tren yang fluktuatif. Sejak tahun 2015, APK belum mencapai target Renstra Kemenristekdikti sebagaimana tampak pada Gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

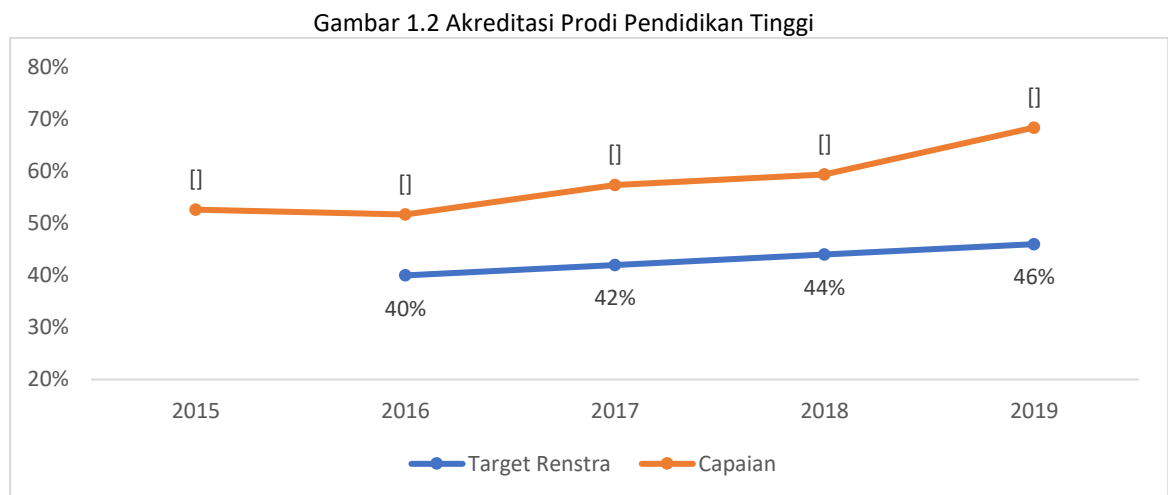
Gambar 1.1 memperlihatkan pencapaian APK berada sedikit di bawah target Renstra Kemenristekdikti dalam kurun waktu 2015 – 2019, dengan rata-rata selisih sekitar 1,5% (satu koma lima persen). Meskipun masih di bawah target Renstra Kemenristekdikti, pencapaian APK pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan dari 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada awal Renstra Kemenristekdikti yang lalu (tahun 2015) menjadi

30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) pada penghujung Renstra Kemenristekdikti. Kenaikan yang terus menerus ini dapat dikaitkan dengan program Bidikmisi yang dijalankan oleh Pemerintah. Bidikmisi memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik. Peningkatan APK pada tingkat SMP/MTs Sederajat, SMA/SMK/MA Sederajat dan Pendidikan Tinggi masih merupakan pekerjaan yang perlu diprioritaskan dalam Renstra Kemenristekdikti ini.

B. Pemerataan Mutu Pendidikan

Dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh penjuru Tanah Air, berbagai upaya telah dilakukan untuk: (1) menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dan (2) meningkatkan mutu guru secara berkelanjutan.

Pada sektor pendidikan tinggi, akreditasi program studi terus menunjukkan kemajuan, bahkan melampaui target Renstra Kemenristekdikti, seperti terlihat dalam Gambar 1.2.



Sumber: Capaian RPJMN, 2019

Capaian prodi terakreditasi minimal B pada tahun 2015 sebesar 52,64% (lima puluh dua koma enam puluh empat persen) dari total prodi, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.2. Namun, pada tahun 2019, capaian akreditasi telah mencapai 68% (enam puluh delapan persen), jauh di atas target Renstra Kemendikbud sebesar 46% (empat puluh enam persen).

1.2 Permasalahan dan Potensi Pembangunan Pendidikan Tinggi

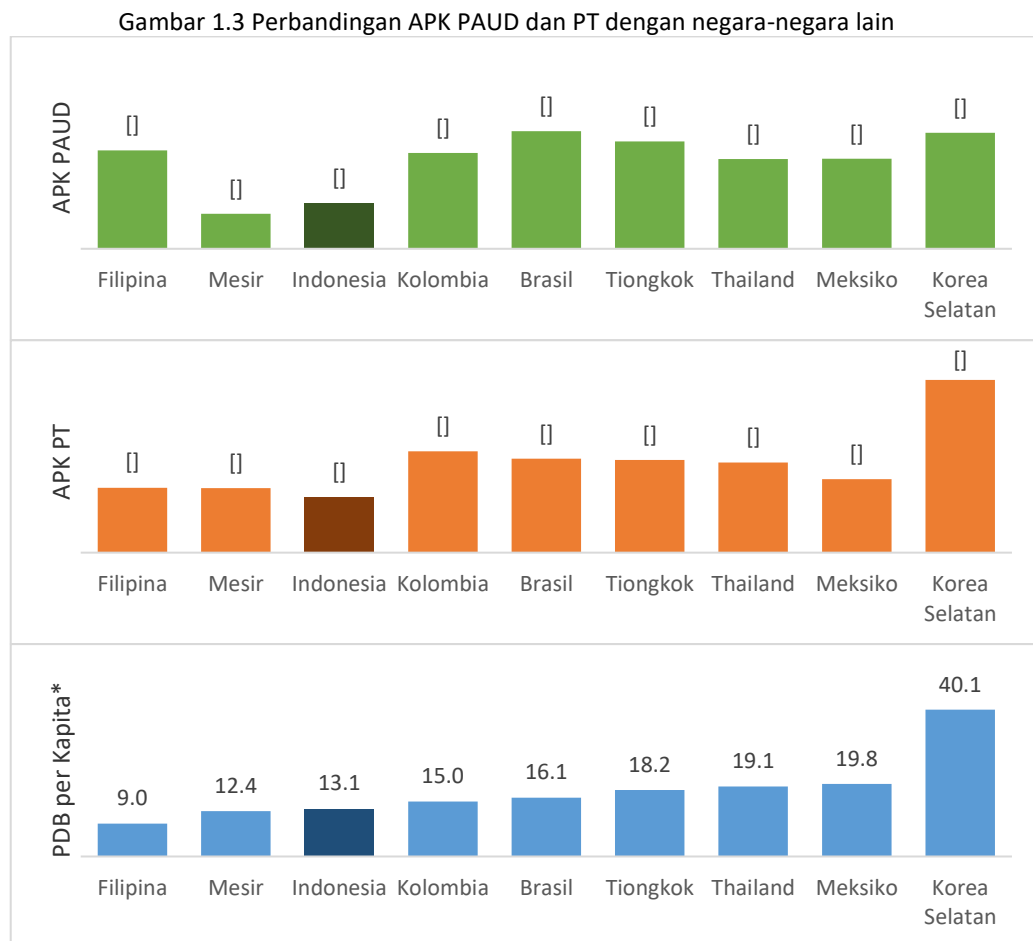
Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan Pendidikan Tinggi, seperti angka partisipasi pendidikan tinggi, pemerataan mutu pendidikan tinggi, dan relevansi pendidikan tinggi, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud

memajukan pendidikan tinggi. Permasalahan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran pendidikan tinggi, dan (3) ketimpangan kualitas pendidikan tinggi secara geografis.

A. Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi

Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Namun jika dibandingkan negara lain, angka partisipasi pendidikan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.

Gambar 1.3 membandingkan angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi Indonesia dengan negara-negara lain, disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita.



Catatan: *) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000

Sumber: APK: Bank Dunia (2017 atau setelahnya); PDB: Bank Dunia (2017, 2018)

Seperti terlihat dalam Gambar 1.3, angka partisipasi Pendidikan Tinggi Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Adapun angka partisipasi Pendidikan Tinggi Indonesia berada di bawah 40% (empat puluh persen).

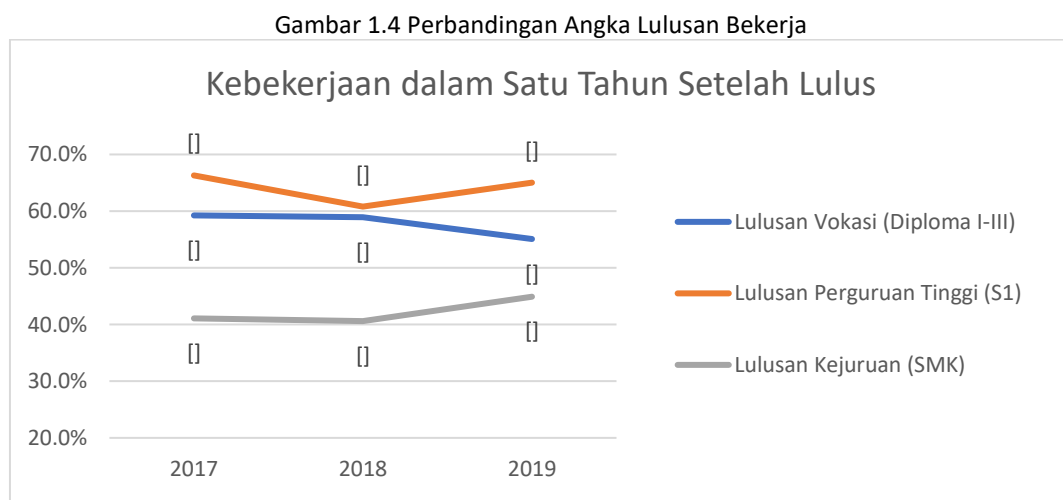
Angka partisipasi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi Dikti 94,4% (sembilan puluh empat koma empat persen), lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi Dikti Indonesia sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen).

Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi Pendidikan Tinggi di Indonesia, diantaranya ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi. Pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga, misalnya, angka partisipasi Dikti hanya 11% (sebelas persen). Ini jauh lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada kuartil yang sama. Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi Dikti mencapai lebih dari 60% (enam puluh persen).

B. Hasil Pembelajaran

Pada jenjang pendidikan tinggi, masalah hasil pembelajaran dapat terlihat dari rendahnya angka lulusan bekerja dari pendidikan tinggi vokasi. Masih rendahnya mutu dan daya saing perguruan tinggi kita antara lain terlihat dari rendahnya peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam *QS World University Ranking*. Hanya ada empat perguruan tinggi Indonesia dalam *QS World University Ranking* - Universitas Indonesia (peringkat 296), Universitas Gadjah Mada (peringkat 320), Institut Teknologi Bandung (peringkat 331), dan Institut Pertanian Bogor (peringkat 600-650).

Perbandingan kekerjaan lulusan dari perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi dilukiskan dalam Gambar 1.4 di bawah.



Sumber: Sakernas, 2019

Gambar 1.4 menunjukkan dalam kurun waktu 2017-2019, angka keberkerjaan lulusan perguruan tinggi vokasi masih jauh di bawah angka lulusan perguruan tinggi akademik. Pada tahun 2019, 55,08% (lima puluh lima koma nol delapan persen) lulusan perguruan tinggi vokasi mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun, dibandingkan dengan 65% (enam puluh lima persen) lulusan S1 (perguruan tinggi akademik).

Ada berbagai isu yang berkontribusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik Pendidikan Tinggi di Indonesia. Ditengarai ada empat masalah penyebab rendahnya hasil pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan DU/DI sebagaimana terlihat dari rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan universitas dan kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) kurang berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridarma oleh semua dosen (tridarma seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan jabatan akademik yang terpusat perizinannya di kementerian, serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman; (3) kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (*dual TVET system*); dan (4) lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di DU/DI, keterbatasan pengetahuan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, dan 50% (lima puluh persen) dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah *in-breeding*).

Di samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikan tinggi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses pendidikan yang bersifat struktural. Tata kelola pendidikan tinggi masih diwarnai oleh ketimpangan kualitas. Ada banyak PTS dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas yang rendah (71% dari 3700 PTS). Secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola internalnya masih belum sehat. Hasil penelitian perguruan tinggi belum dikelola secara maksimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh industri. Tak dapat dipungkiri, pendanaan pendidikan tinggi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pendanaan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di balik permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia, terdapat disparitas akses pendidikan antar kuintil ekonomi masyarakat. Pada kuintil terendah, hanya 10% (sepuluh persen) masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. Sedangkan, pada kuintil tertinggi, akses sudah mencapai 60% (enam puluh persen).

1.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan Tinggi

Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud mengidentifikasi 8 (delapan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan. Tabel 1.1 menunjukkan kesembilan tantangan tersebut.

Tabel 1.1 Tantangan Pemajuan Pendidikan

No.	Tantangan
1.	Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.	Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3.	Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
4.	Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukol rata (<i>one size fits all</i>) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
5.	Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
6.	Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
7.	Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
8.	Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (<i>agency</i>) semua pemangku kepentingan

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berketuhanan dan berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.



Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: berketuhanan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas.

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1) Berketuhanan dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang berketuhanan dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci berketuhanan dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

(2) Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

(3) Gotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

(4) Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

(5) Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

(6) Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

2.2 Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

2.3 Tata Nilai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, mengacu pada Tata Nilai Renstra Kemendikbud 2020-2024 sebagai berikut:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- h. Tidak monoton;

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan
- d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;

- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemendikbud yang prima.

2.4 Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Perumusan tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ditujukan untuk mencapai visi dan misi Kemendikbud. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan tiga tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2020-2024

No.	Tujuan
1.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi
2.	Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan
3.	Penguatan sistem tata Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

2.5 Sasaran Program Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Pendidikan tinggi, diperlukan sejumlah sasaran program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan tinggi.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** — Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan adalah meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** — Penguatan sistem tata Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah terwujudnya tata Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkualitas

Ketiga sasaran program dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan tinggi terangkum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran Program Pendidikan Tinggi pada tahun 2020-2024

No.	Sasaran Program	Tujuan terkait
1.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi	1
2.	Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan	2
3.	Penguatan sistem tata Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	3

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong-royong”**

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

**“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”**

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud

Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	- Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; 3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; 4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah; 5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;
		- Meningkatkan produktivitas dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan 2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
2.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	-Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3. pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
		-Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga; 2. pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3. perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4. pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5. pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
		Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan budaya literasi; 2. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan 3. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Tinggi

Arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi mendukung arah kebijakan dan strategi Kemendikbud melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di jenjang pendidikan tinggi serta hasil pembelajaran yang berkualitas.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
- (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

- (1) pembukaan program studi baru;
- (2) sistem akreditasi perguruan tinggi;

- (3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
- (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Sebagai jiwa dari kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selama 2020-2024, Kebijakan Kampus Merdeka terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan angka partisipasi Pendidikan tinggi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:

1. meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;
2. meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai *platform* pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;
3. mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.

2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penguatan mutu dengan menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:

1. mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*;
2. merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH;
3. meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
4. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai *Centers of Excellence* dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
5. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
6. meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;

7. meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (*Top 100 QS/THES*) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;
8. meningkatkan *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek;
9. membangun *Science Techno Park* di 5 (lima) universitas: UGM, UI, ITB, IPB, dan ITS;
10. melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam '*pentahelix*' untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
11. mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
12. meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
13. mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
14. mengembangkan *future skills platform* bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
15. melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
16. memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penguatan relevansi pendidikan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

1. memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di pendidikan tinggi melalui sertifikasi;
2. mendorong pembelajaran, *project work*, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan *teaching factory* dan *teaching industry* agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
3. menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
4. memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui *platform* teknologi; dan
5. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan tinggi.

3. Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. menyediakan beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan;
2. memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri;
3. menyelenggarakan sertifikasi dosen;
4. melakukan penilaian angka kredit dosen dan tenaga kependidikan;

5. menyelenggarakan program *World Class Professor* dalam rangka mendukung pencapaian *World Class University*.
4. **Penguatan sistem tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penguatan akuntabilitas layanan pendidikan Tinggi adalah bertindak sebagai penunjang, fasilitator, dan pembina untuk satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 	Tahun 2021

3.4 Kerangka Kelembagaan

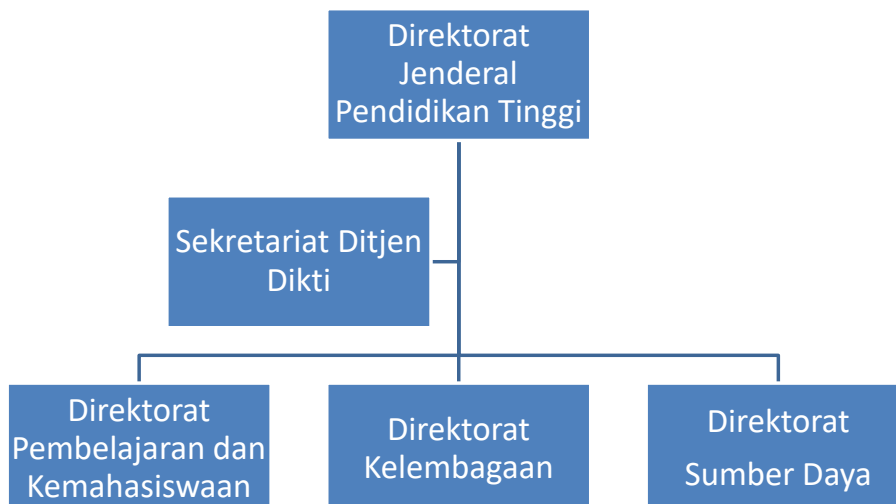
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 138, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya Pendidikan tinggi akademik;
- c. perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan tinggi akademik;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.4.1 Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah seperti yang tergambar pada gambar berikut ini:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memiliki 4 (empat) Unit Eselon II sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Direktorat Kelembagaan
4. Direktorat Sumber Daya

3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbud. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Ditjen DIKTI diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality, networking, dan entrepreneurship*.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

a. Kondisi ASN Ditjen DIKTI

Dengan bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi di Kemendikbud, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3 maka jumlah SDM Ditjen DIKTI saat ini adalah sebanyak 110.378 (seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pegawai.

Tabel 3.3 Jumlah ASN Ditjen DIKTI Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	286
2	PTN/LLDIKTI	110.092
	Total	110.378

b. Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2020-2024

Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Ditjen DIKTI. Disamping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Tabel 3.4 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM Ditjen DIKTI sampai Tahun 2024.

Tabel 3.4 Proyeksi Kebutuhan SDM Ditjen DIKTI Tahun 2020-2024

No	Unit Kerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	41	30	37	30	30
2	Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	11.201	10.563	11.150	11.796	11.334
	Total	11.242	10.593	11.187	11.826	11.364

3.4.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi Kemendikbud dan misi serta tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi Kemendikbud dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan tiga sasaran program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran program tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel 4.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKP,IKK)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Program Pendidikan Tinggi						
SP 5.1	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi						
IKP 5.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio		0,19	0,20	0,21	0,23
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	lembaga	3	3	4	5	6
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>	lembaga	4	4	5	5	6
IKP 5.1.4	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	14	17	20	23	26
IKP 5.1.5	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)	%	10	11	12	13	15
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka	%	64,77	65,25	65,72	66,20	66,70

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKP,IKK)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	waktu 1 tahun setelah kelulusan						
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	30	33	36	40	44
IKP 5.1.8	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	30	35	40	45	50
IKP 5.1.9	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)	%	5	8	12	16	20
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan						
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	45,1	49,3	53,4	57,6	61,7
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	69,0	71,8	74,6	77,4	80,0
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi S3	%	17,3	18,0	18,6	19,3	20,0
SP 5.3	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas						
IKP 5.3.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB	predikat	BB				
IKP 5.3.2	Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1				

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran program tersebut, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja program tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Program Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i> b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i> c. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH d. Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) e. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan f. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR g. Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus h. Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)
	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase dosen yang bersertifikat b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya c. Persentase dosen berkualifikasi S3
	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Selanjutnya guna menyesuaikan restrukturisasi program kementerian/lembaga, maka indikator kinerja program tahun 2021-2024, tersaji pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2021-2024

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Program Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i> c. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i> d. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH e. Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) f. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan g. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR h. Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus i. Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)
	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase dosen yang bersertifikat b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya c. Persentase dosen berkualifikasi S3

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan sasaran program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dibagi ke dalam dua periode yakni:

- a. periode tahun 2020; dan
- b. periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020-2024

Alokasi (Rp Miliar)				
2020	2021	2022	2023	2024
32.002,16	43.726,54	51.038,35	58.568,90	63.326,58

BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN.

Renstra ini telah menjabarkan misi dan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan tinggi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan tinggi selama lima tahun mendatang.

Lampiran 1a: Matriks Kinerja dan Pendanaan Ditjen DIKTI Tahun 2020

023.17.14	Program Pendidikan Tinggi			32.002,16	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SP 5.1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi				
IKP 5.1.1	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	lembaga	3		Dit. Kelembagaan
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>	lembaga	4		Dit. Kelembagaan
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	14		Dit. Kelembagaan
IKP 5.1.4	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)	%	10		Dit. Belmawa
IKP 5.1.5	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64.77		Dit. Belmawa
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	30		Dit. Belmawa
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	30		Dit. Belmawa
IKP 5.1.8	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)	%	5		Dit. Sumber Daya
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan				
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	45.1		Dit. Sumber Daya
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	69.0		Dit. Sumber Daya
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi S3	%	17.3		Dit. Sumber Daya
SP 5.3	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas				
IKP 5.3.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB	predikat	BB		Setditjen Dikti
IKP 5.3.2	Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		Setditjen Dikti
4258.4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan			3,334.72	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan
SK 1	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas				
IKK 1.1	Jumlah program studi relevan KKN/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)	prodi	850		Dit. Belmawa
IKK 1.2	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional	prodi	20		Dit. Belmawa
IKK 1.3	Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100	prodi	600		Dit. Belmawa
IKK 1.4	Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University	lembaga	13		Dit. Kelembagaan
IKK 1.5	Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi	lembaga	40		Dit. Kelembagaan
IKK 1.6	Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri	lembaga	1,000		Setditjen Dikti
SK 2	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas				
IKK 2.1	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	orang	200,000		Dit. Belmawa
IKK 2.2	Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	orang	625		Dit. Belmawa
IKK 2.3	Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha	orang	3,000		Dit. Belmawa
IKK 2.4	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	orang	51,500		Dit. Belmawa
IKK 2.5	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	orang	7,500		Dit. Belmawa
IKK 2.6	Jumlah publikasi (artikel) internasional	artikel	17,916		Dit. Belmawa
IKK 2.7	Jumlah sitasi di jurnal internasional	sitasi	42,821		Dit. Belmawa
IKK 2.8	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	prototipe	136		Dit. Belmawa
IKK 2.9	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	KI	972		Dit. Belmawa
IKK 2.10	Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat	paten	7		Dit. Belmawa
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya			2,411.72	Direktorat Sumber Daya
SK 3	Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas				
IKK 3.1	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya	orang	6,034		Dit. Sumber Daya

IKK 3.2	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri	orang	1,515		Dit. Sumber Daya
IKK 3.3	Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	orang	10,000		Dit. Sumber Daya
IKK 3.4	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	orang	3,070		Dit. Sumber Daya
IKK 3.5	Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i>	orang	60		Dit. Sumber Daya
SK 4	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>Center of Excellence</i>				
IKK 4.1	Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya	lembaga	13		Dit. Sumber Daya
IKK 4.2	Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya	lembaga	13		Dit. Sumber Daya
IKK 4.3	Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi	lembaga	4		Dit. Sumber Daya
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi			26,255.72	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SK 5	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi				
IKK 5.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		Setditjen Dikti
IKK 5.2	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	5		Setditjen Dikti
IKK 5.3	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80		Setditjen Dikti

Lampiran 1b: Matriks Kinerja dan Pendanaan Ditjen DIKTI Tahun 2021-2024

5	Program Pendidikan Tinggi						43,726.54	51,038.35	58,568.90	63,326.58	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Sekretariat Jenderal
SP 5.1	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi										
IKP 5.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0.19	0.20	0.21	0.23					Dit. Belmawa
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	lembaga	3	4	5	6					Dit. Kelembagaan
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>	lembaga	4	5	5	6					Dit. Kelembagaan
IKP 5.1.4	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	17	20	23	26					Dit. Kelembagaan
IKP 5.1.5	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)	%	11	12	13	15					Dit. Belmawa
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65.25	65.72	66.20	66.70					Dit. Belmawa
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	33	36	40	44					Dit. Belmawa
IKP 5.1.8	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	35	40	45	50					Dit. Belmawa
IKP 5.1.9	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)	%	8	12	16	20					Dit. Sumber Daya
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan										
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	49.3	53.4	57.6	61.7					Dit. Sumber Daya
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	71.8	74.6	77.4	80.0					Dit. Sumber Daya
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi S3	%	18.0	18.6	19.3	20.0					Dit. Sumber Daya
4258, 4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan										Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan
SK	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas										
IKK	Jumlah program studi relevan KKN/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)	prodi	2,000	3,000	4,000	5,000					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional	prodi	32	35	39	43					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100	prodi	700	720	750	800					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University	lembaga	13	13	13	13					Dit. Kelembagaan
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi	lembaga	45	50	55	60					Dit. Kelembagaan
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri	lembaga	1,050	1,100	1,150	1,200					Setditjen Dikti
SK	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas										
IKK	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	orang	220,000	242,000	266,200	292,820					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	orang	700	800	1,000	1,100					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha	orang	3,300	3,630	3,993	4,392					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	orang	143,523	157,875	173,662	191,028					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	orang	8,250	9,075	9,985	10,980					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah publikasi (artikel) internasional	artikel	21,226	24,536	27,846	31,159					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah sitasi di jurnal internasional	sitasi	47,056	51,291	55,526	59,770					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	prototipe	178	220	262	304					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	KI	1,182	1,392	1,602	1,812					Dit. Belmawa
IKK	Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat	paten	10	15	20	25					Dit. Belmawa
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya										Direktorat Sumber Daya
SK	Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas										
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya	orang	9,463	9,273	12,317	14,280					Dit. Sumber Daya
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri	orang	1,790	1,790	1,790	1,790					Dit. Sumber Daya
IKK	Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	orang	10,000	10,000	10,000	10,000					Dit. Sumber Daya
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	orang	3,090	3,090	3,090	3,090					Dit. Sumber Daya
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i>	orang	100	100	100	100					Dit. Sumber Daya
SK	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>Center of Excellence</i>										
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarannya	lembaga	24	24	24	24					Dit. Sumber Daya
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya	lembaga	13	13	13	13					Dit. Sumber Daya
IKK	Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi	lembaga	4	5	5	5					Dit. Sumber Daya
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi										Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi										
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	A	A	A					Setditjen Dikti
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2	3	4	5					Setditjen Dikti
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	82	83	84	85					Setditjen Dikti